

### KAJIAN PROSPEK PENGEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PROVINSI RIAU

Eddiwan

*Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau  
Pusat Penelitian Industri dan Perkotaan  
Jl. Pattimura No. 9 Pekanbaru, Riau.*

#### Abstrak

Perikanan tangkap di provinsi Riau (Laut Cina Selatan) berpotensi besar untuk dimanfaatkan (53,61%), sedangkan Selat Malaka mencapai titik jenuh (101,12%). Keberadaan armada perikanan sejumlah 35.432 sebagiannya masih untuk beroperasi diperairan pantai (< 7 mil), sedangkan alat tangkap yang beroperasi sejumlah 23.648 unit hanya layak beroperasi di perairan pantai. Sumberdaya manusia berupa tenaga kerja tersedia cukup memadai. Sarana, prasarana dan fasilitas perikanan masih belum memadai.

**Kata Kunci:** Perikanan tangkap, provinsi Riau, laut Cina Selatan, Selat Malaka, armada perikanan, perairan pantai, fasilitas perikanan.

#### Pendahuluan

Provinsi Riau sebagai sebuah provinsi yang didominasi oleh lingkungan kawasan perairan dan bertebaran ratusan pulau-pulau kecil dan besar membuatnya dikenal sebagai negeri bahari. Riau dengan luas wilayah 329867,61 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 94561,61 (28,67 %) km<sup>2</sup> serta lautan 235306 (71,33 %) km<sup>2</sup>, mempunyai peluang yang sangat besar untuk dioptimalisasikan sebagai sumber devisa dan kemakmuran bagi rakyat dan daerahnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hasil perairan Riau suatu ketika akan mampu menggantikan minyak bumi sebagai sumber devisa negeri ini asalkan sejak sekarang

sumberdaya perikanan dan kelautan telah dikelola secara baik dan bijaksana.

Perikanan tangkap adalah satu sektor yang potensial dalam dunia usaha perikanan disamping usaha budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil perikanan. Usaha perikanan tangkap ini merupakan usaha tertua dalam dunia kebaharian dan telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia. Namun disayangkan hingga saat ini belum ada modernisasi yang layak dan akurat untuk memberdayakan sektor ini sehingga mampu meningkatkan produksi dan hasil tangkapannya secara linear. Perkara yang selalu dijadikan alasan untuk menutupi kelemahan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan

secara lestari adalah memvonis bahwa sektor ini membutuhkan biaya yang besar. Pada hal dari perhitungan Rentabilitas menunjukkan bahwa sektor ini bernilai komersial. Kelemahannya di Indonesia ini mungkin dalam kemampuan menguasai teknologi penangkapan dan manajemen usaha perikanan, termasuk di dalamnya sistem agribisnis perikanan. Oleh sebab itu untuk menggugah kepedulian kita terhadap sektor yang potensial tetapi kian hari kian surut ini adalah dengan kajian prospek pengembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Riau, sejalan dengan visi Provinsi Riau 2020.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2002 di kota Dumai, kabupaten Bengkalis, kabupaten Karimun, kabupaten Kepulauan Riau, kota Batam, dan kabupaten Natuna.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap tokoh masyarakat nelayan dan pelaksana teknis perikanan laut serta pegawai Pemda setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan statistik Dinas Perikanan dan Kelautan dari masing-masing kabupaten dan provinsi Riau. Juga dikumpulkan data kabupaten dalam angka dari masing-masing kabupaten dan provinsi Riau dalam angka, masing-masing selama lima tahun terakhir.

Objek yang dijadikan responden diambil secara acak proporsional menurut masing-masing kabupaten dan kota. Populasi nelayan terbanyak yang ada di lokasi penelitian dijadikan kawasan utama studi. Alat dan armada tangkap yang dimiliki nelayan menjadi sumber informasi dan dasar pengujian status

responden. Faktor-faktor yang mendukung dalam kegiatan perikanan tangkap, seperti sarana, prasarana dan fasilitas perikanan dihimpun untuk dianalisa.

Dari data yang diperoleh dibuat tabulasinya. Selanjutnya dilakukan uji korelasi sederhana antara faktor jumlah alat tangkap, jumlah armada dan produksi hasil tangkapan. Selanjutnya, data dianalisis dan dibahas secara deskriptif.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Potensi Perikanan

Di provinsi Riau terdapat tiga perairan besar yang berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perikanan di masa yang akan datang, yaitu perairan laut China Selatan, Selat Malaka dan perairan umum. Pada saat ini potensi lestari sumberdaya perairan yang tersedia di perairan provinsi Riau secara keseluruhan tersedia sejumlah 815.650 ton yang meliputi sumberdaya perikanan dari perairan Laut China Selatan (602.384 ton), Selat Malaka (141.546 ton) dan Perairan Umum (23.720 ton). Sedangkan yang telah dimanfaatkan baru sejumlah 167.664 ton (potensi lestari 361.430 ton), Selat Malaka 85.881 ton (potensi lestari 84928 ton) dan perairan umum 13.232 ton (potensi lestari 14.232 ton) (Statistik Perikanan 1998). Sedangkan pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan yang telah dilakukan itu baru sebesar 46,39 % (di perairan Laut China Selatan), 101,12 % (di perairan Selat Malaka), dan 92,21 % (di perairan umum).

Dari data tersebut terlihat bahwa perairan laut Cina Selatan masih menyimpan potensi sumberdaya perairan yang belum termanfaatkan sebesar 53,61 % lagi. Dengan demikian berarti masih

tersedia lebih dari setengahnya untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Peluang ini memberikan kesan bahwa selama ini masyarakat Riau masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut secara baik dan efektif. Begitu juga pihak pemerintah daerah Riau terlalu lamban dan kurang agresif dalam membangun dan mengembangkan pembangunan perikanan tangkap dalam upaya peningkatan produksi hasil perikanan dari sektor penangkapan. Sehingga produksi masih belum mencapai tingkat yang optimal. Di lain pihak, akibatnya swasta menjadi tidak tersentuh untuk menginvestasikan dananya agar berusaha mengembangkan perikanan tangkap tersebut. Padahal potensi ini sebenarnya membuka peluang besar untuk penyerapan tenaga kerja dan upaya penuntasan kemiskinan bagi masyarakat pesisir dan pantai yang berdiam di pulau-pulau di provinsi Riau. Namun sangat disayangkan, peluang dan kejelian untuk memanfaatkan potensi perairan laut Cina Selatan ini justru terlihat jelas dimata nelayan asing, seperti nelayan dari Thailand, China, Taiwan, Korea, Jepang dan lain sebagainya. Bila hal semacam ini masih terus berkelanjutan maka jelas berakibat sangat merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Di Selat Malaka telah terjadi eksploitasi sumberdaya hayati perairan lebih dari 84.928 ton selama tahun 1998 (Statistik Perikanan, 1998). *Overfishing* tersebut telah mencapai 1,12 persen di atas potensi lestariannya. Peristiwa ini terjadi karena perairan Selat Malaka relatif lebih dekat dan mudah dicapai oleh para nelayan yang berada di sekitar perairan tersebut. Bagi masyarakat kepulauan kegiatan penangkapan di Selat Malaka sudah berlangsung sejak ber-

puluh-puluh tahun yang lalu. Disamping itu, *overfishing* juga banyak disebabkan oleh pesatnya penambahan alat tangkap yang beroperasi di kawasan tersebut (Ricker, 1975). Disamping itu, tekanan terhadap kualitas perairan dan kerusakan lingkungan perairan sangat besar terjadi di kawasan selat Malaka tersebut karena daerah ini merupakan kawasan lalu lintas perairan antara negara Malaysia, Singapura dan Indonesia. Dalam kondisi demikian maka kesetimbangan perairan akan terganggu dan sulit untuk dipertahankan. Oleh sebab itu maka pengembangan perikanan tangkap dimasa depan sebaiknya tidak lagi diarahkan ke perairan Selat Malaka dan di sekitar pantainya. Bila masih dilakukan juga maka hasil tangkapan jelas tidak akan memuaskan dan kerusakan sumber daya perairan tidak dapat dihindarkan bahkan menjadi semakin parah.

Perairan umum yang tersebut di seluruh wilayah provinsi Riau masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Hingga saat ini perairan umum masih menyediakan sumber daya hayati perikanan sebesar 7,09 persen lagi dari potensi lestariannya. Besarnya tingkat pemanfaatan perairan ini karena masyarakat yang berdomisili di sekitar perairan ini tidak mempunyai alternatif mata pencaharian selain menangkap ikan dari perairan umum. Sedangkan ketersediaan perairan umum relatif sangat terbatas (23720 ton) atau hanya sebesar 0,039 persen dari potensi sumberdaya yang tersedia di laut Cina Selatan. Dilain pihak terlihat tingkat kesetimbangan antara jumlah nelayan dengan potensi yang ada sangat tidak berimbang. Kemudian, peluang usaha penangkapan untuk terus dikembangkan di perairan ini kelihatannya kecil sekali sebab tingkat

pemanfaatan perairan ini sudah mencapai lebih dari tiga perempat dari potensi lestarinya. Diperkirakan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum sudah hampir mencapai tingkat optimal. Bila ditingkatkan terus usaha eksploitasinya maka akan terjadi ketidak setimbangan ekosistem dan kerusakan organisme air sulit dihindari. Upaya yang perlu dilakukan adalah *restocking* untuk jenis ikan ekonomis tinggi ke perairan umum (Royce, 1984). Lalu perlu dikembangkan terus usaha perikanan lainnya, seperti usaha budidaya perikanan.

Berdasarkan jumlah rumah tangga perikanan (RTP) maka ada sejumlah 61.664 RTP di provinsi Riau. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,30 % dibandingkan tahun sebelumnya (58.008 RTP). Menurut kabupaten maka pertumbuhan RTP tertinggi dari tahun 1997 sampai 1998 adalah kabupaten Bengkalis (11.755 RTP), baru kemudian Kepulauan Riau (11.860 RTP), sedangkan yang terendah ditemukan di kota Batam (2416 RTP) dan Pekanbaru (495 RTP).

Hal ini dapat dimaklumi karena wilayah kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang mempunyai daerah perairan yang cukup luas serta terkandung potensi sumberdaya nelayan yang cukup besar yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Sebaliknya, kota Batam dan Pekanbaru dapat dikatakan bukan sebagai daerah perikanan karena arah pengembangan dan kebijakan pemerintah adalah menjadikannya sebagai pusat industri dan perdangan di provinsi Riau. Hal ini juga didukung oleh kondisi wilayah dan potensi sumberdaya yang ada. Kota Batam meskipun mempunyai perairan

tetapi relatif sangat terbatas dan semakin terjepit diantara berbagai pengembangan, terutama pengembangan industri. Oleh sebab itu, walaupun kota Batam akan mengembangkan diri disektor perikanan maka daerah ini lebih tepat dijadikan sebagai pusat bagi *fishing port* ataupun *fishing base* saja dari pada menjadi kawasan produksi perikanan. Hal ini mendukung karena letak geografis dan geo-ekonomis daerah ini lebih memungkinkan kearah itu (Hannesson, 1993), apalagi daerah ini merupakan kawasan terdekat yang berhampiran dengan negara Singapura yang selama ini dikenal sebagai pusat lintasan perdagangan dunia sejak dahulu hingga saat ini.

Dari jumlah RTP penangkapan laut di provinsi Riau sebesar 35.879 RTP yang terdiri dari kabupaten Bengkalis (8.253 RT), Kepulauan Riau A (11.683 RTP), Kepulauan Riau B (11.167 RTP), Indragiri Hilir (2.545 RTP), dan Batam (2.246 RTP). Menurut persentase pertumbuhan untuk kabupaten Bengkalis sebesar 24,54 %, Kepulauan Riau A 0,07 %, Kepulauan Riau B 0,11 %, Indragiri Hilir-0,59 %, dan Batam 0 % (Tabel 3). Untuk kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Pekanbaru tidak ditemukan jumlah RTP nya karena daerah ini usaha penangkapan di laut tidak ada.

Sedangkan untuk RTP penangkapan di perairan umum ditemukan Kabupaten Bengkalis 4.278 RTP, Indragiri Hilir 2.500 RTP, Indragiri Hulu 5.265 RTP, Kampar 4.247 RTP dan Pekanbaru 85 RTP. Khusus untuk kabupaten Kepulauan Riau A dan Kepulauan Riau B, serta Batam tidak didapatkan jumlah RTP-nya. Disini terlihat bahwa pertumbuhan RTP penangkapannya sangat bervariasi, seperti di kabupaten Bengkalis sebesar

5,94 %, Inhil -0,16 %, Inhu -4,22%, dan Kampar -0,02. serta Pekanbaru tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 4).

Di sini terlihat bahwa potensi rumah tangga perikanan untuk penangkapan laut cukup baik. Kabupaten yang mempunyai prospek tumbuh lebih baik adalah kabupaten Bengkalis, Kampar dan Indragiri Hilir. Sedangkan untuk RTP perairan umum pada umumnya tidak memperlihatkan peluang untuk tumbuh lebih besar lagi. Hal ini dapat difahami karena perairan umum memang sangat terbatas bagi pengembangan perikanan tangkap. Akibatnya juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan RTP-nya.

## 2. Armada dan Alat Penangkapan Ikan

Berdasarkan laporan Statistik Perikanan provinsi Riau (1996 dan 1997) diketahui bahwa jumlah armada perikanan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Secara keseluruhan dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan jumlah armada baik jenis kapal motor (KM) ataupun kapal tanpa motor (KTM). Peningkatan kapal motor yang cukup besar terjadi pada tahun 1996 ke 1997 yakni 672 buah menjadi 3356 buah (bertambah 2.684 buah atau meningkat sebesar 399 %). Sedangkan pada tahun 1997 ke 1998 dari 3.356 buah menjadi 5.409 buah (bertambah 2.053 buah atau meningkat sebesar 61,17 %). Begitu juga pada tahun 1998 ke 1999 peningkatan terjadi dari 5.409 buah menjadi 6.724 buah (bertambah 1315 buah atau meningkat sebesar 24,31%). Peningkatan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah RTP penangkapan laut. Berarti juga usaha perikanan tangkap di daerah ini meningkat secara tajam pada

tahun tersebut. Peningkatan yang tajam ini dimungkinkan karena pada tahun itu diluncurkan paket bantuan armada perikanan baik nelayan tradisional di beberapa daerah kabupaten di provinsi Riau. Begitu pula dengan program jaringan pengaman sosial yang diluncurkan pemerintah juga ikut mendorong naiknya jumlah armada tersebut.

Kontradiksi data tersebut terlihat ketika peneliti melakukan studi terhadap program bantuan dinas perikanan terhadap pengembangan usaha perikanan. Realitas di lapangan ditemukan bahwa banyak KM yang beralih fungsi dari usaha perikanan menjadi usaha jasa pengangkutan penumpang antar pulau atau diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi nelayan tersebut. Mestinya pemberian paket bantuan KM ini harus melalui suatu mekanisme dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan bukan memakai mekanisme proyek untuk proyek.

KUB (kelompok usaha bersama) yang mestinya ada pada tiap-tiap cabang Dinas Perikanan hendaklah dikembangkan dan dibina terus. KUB yang dibina hendaknya menghindari dasar-dasar hubungan KKN (korupsi, koneksi, dan nepotisme) tetapi benar-benar berakar pada azas profesionalitas yang tinggi. Bila ini dapat diterapkan maka paket ini akan dapat mencapai sasaran.

Fluktuasi KTM terjadi pada setiap tahunnya. Dari tahun 1995 sampai 1999 jumlah KTM adalah 2.116 buah (1995), 2.124 buah (1996) berarti meningkat sebesar 0,38 % dari jumlah tahun sebelumnya, 2.009 buah (1997) berarti menurun sebesar 5,41% dari jumlah tahun sebelumnya, 2.939 buah (1998) berarti kembali meningkat sebesar

46,29 % dari jumlah tahun sebelumnya dan 3100 buah (1999) berarti meningkat sebesar 54,78 % dari jumlah tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah KTM ini terjadi karena adanya paket bantuan pemerintah seperti yang terjadi pada KM meskipun persentasenya lebih kecil dari KM. Sebaliknya penurunan jumlah KTM banyak disebabkan oleh beralihnya fungsi KTM bantuan ke sektor lain. Disamping itu fluktuasi harga hasil tangkapan yang tidak menentu juga mempengaruhi jumlah KTM tersebut (Jones, 1968; Ferno and Steiner, 1994). Ini dapat terjadi karena pada saat itu usaha budidaya ikan jauh lebih prospektif sehingga banyak nelayan yang menjual KTMnya dan beralih menjadi petani keramba atau petambak udang. Hal lain adalah karena tekanan ekonomi yang kuat bagi orang Indonesia maka kesulitan ekonomi memaksa mereka menjual harta miliknya, termasuk KTM-nya. Khusus pada tahun 1996 ke 1997 juga terjadi kompetisi yang keras antara nelayan lemah (KTM) dengan nelayan kuat (KM) dalam eksploitasi hasil laut. Keterbatasan daya melaut dari KTM menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh hasil tangkapan yang mencukupi bagi kebutuhan hidupnya. Sehingga banyak KTM yang tidak dioperasikan ketika itu dan cenderung beralih profesi ke sektor lain yang lebih menjanjikan. Namun setelah harga ikan meningkat dan menjanjikan pata tahun 1997 ke atas maka banyak para nelayan kembali menekuni profesi nelayan tersebut. Ini sangat realistis karena harga ikan ketika itu dapat naik mencapai 200 hingga 300 % dari harga normalnya.

Khusus untuk armada penangkapan laut terjadi pertumbuhan yang kecil dan bahkan ada yang mengalami

penurunan dilihat berdasarkan masing-masing kabupaten. Pertumbuhan jumlah armada berkisar antara 0 – 12,74 % dari tahun 1997 ke 1998, sedangkan penurunan terjadi sebesar 4,08% di kabupaten Indragiri Hilir. Pertumbuhan yang kecil disebabkan nelayan lebih banyak mengoptimalkan armada yang ada dan tidak melakukan penambahan terhadap armada yang baru. Namun penurunan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir diduga karena penangkapan di laut yang biasanya dilakukan oleh nelayan setempat mengalami perubahan. Banyak nelayan di daerah tersebut yang beralih profesi ke profesi lain, seperti menggunakan armadanya untuk aktivitas transportasi air antar pulau, atau ada juga yang beralih profesi sebagai buruh, penebang pohon atau pekerja kasar di tempat lain. Kondisi pertumbuhan armada penangkapan di laut ini jauh lebih baik dibandingkan dengan armada penangkapan di perairan umum (hanya berkisar antara 0 – 1,09 % dan penurunan terjadi antara 0,13 – 0,26 % sejak 1997 sampai 1998).

Berdasarkan jumlah alat tangkap memperlihatkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah alat tangkap sebesar 20,91 % pada kabupaten Indragiri Hilir, dan sebaliknya terjadi pula penurunan antara 0 – 1,97 % pada kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar dan Pekanbaru. Sedangkan daerah lain tidak terdata secara baik dan diperkirakan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Peningkatan jumlah alat tangkap ini terjadi karena adanya paket bantuan pemerintah yang merupakan satu paket dengan armada tangkap dan lebih bertujuan untuk meredam gejolak sosial masyarakat ketika itu. Sedangkan penurunan jumlah alat tangkap pada beberapa kabupaten itu lebih disebabkan

*fishing ground* yang menjadi daerah operasi penangkapan sudah tidak mendukung bagi penambahan alat tangkap lagi (Ayodhya, 1975; Nakamura, 1969). *Overfishing* terutama terjadi bagi kawasan di sekitar perairan Selat Malaka dan kawasan di sekitar pantai di pulau-pulau. Untuk perairan umum permasalahan utama lebih disebabkan karena adanya tekanan yang kuat dari dampak pencemaran yang bersumber dari berbagai polutan dari daratan (Regenstein and Carrie, 1919). Pengembangan pabrik dan industri yang ada di daerah hulu menyebabkan kualitas perairan mengalami kemunduran yang cukup serius, bahkan sampai pada tingkat yang membahayakan bagi organisme perairan sehingga peluang untuk mengembangkan alat tangkap menjadi kian kecil.

### 3. Produksi Perikanan

Volume dan nilai produksi perikanan sejak 1995 sampai 1999 mengalami fluktuasi yang menarik. Sejak tahun 1995 hingga 1998 mengalami kenaikan dan baru pada tahun 1999 menurun. Kenaikan antara tahun 1995 ke 1996 adalah 12,89%, tahun 1996 ke 1997 sebesar 10,47%, tahun 1997 ke 1998 sebesar 24,44% dan sebaliknya penurunan terjadi sebesar 22,28% pada tahun 1999. Peningkatan volume produksi ini terjadi karena sejak tahun 1995 hingga 1998 terjadi peningkatan usaha perbaikan kegiatan usaha perikanan, sedangkan penurunan terjadi karena banyak sentra produksi perikanan yang mengurangi aktivitas usahanya karena terjadi perubahan harga yang cukup signifikan dan besarnya biaya operasional (Hannesson, 1993).

Sebaliknya pertumbuhan produksi perikanan di provinsi Riau

terjadi antara 1,72 – 39,09 % pada kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau A, Indragiri Hilir, Kepulauan Riau B, Batam dan Kampar. Sebaliknya penurunan terjadi pada kabupaten Indragiri Hulu dan Pekanbaru masing-masing sebesar 13,2 % dan 26%. Peningkatan pertumbuhan disebabkan berkembangnya usaha perikanan tangkap di daerah tersebut, sedangkan penurunan terjadi karena banyak kegiatan perikanan yang gagal, sehingga produksi pada daerah tersebut menjadi menurun.

Peningkatan jumlah pertumbuhan produksi perikanan dari sektor penangkapan laut menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan baik. Adapun kisaran pertumbuhan produksi tersebut dari berbagai kabupaten adalah antara 0,93-13,82%. Sedangkan produksi tertinggi ditemukan dari kabupaten Kepulauan Riau (64959,7 ton pertahun) dan terkecil didapat dari kabupaten Indragiri Hilir (34721,2 ton per tahun). Disini terlihat bahwa prospek penangkapan bagi kawasan Riau Kepulauan dan sekitarnya menunjukkan peluang yang besar dan prospektif. Produksi penangkapan dari kawasan laut ini terutama bersumber dari perairan laut Cina Selatan dan Selat Malaka serta perairan umum lainnya. Bila usaha penangkapan dapat terus di kembangkan di perairan ZEE di laut China Selatan maka produksi akan dapat ditingkatkan terus secara lebih baik.

Berdasarkan laporan Statistik Perikanan Provinsi Riau (2000) maka diketahui bahwa setelah terjadi pemekaran kabupaten dalam wilayah provinsi Riau maka produksi perikanan dari masing-masing kabupaten tergambar sebagai berikut; Kabupaten Bengkalis (88480 ton), Kepulauan Riau (A) (53.225 ton), Indragiri Hilir (40.579,6 ton),

Kepulauan Riau (B) (33.440,9 ton), Batam (20.483,9 ton), Natuna (58.747,6 ton), Indragiri Hulu (3.068,9 ton), Kampar (10.453,9 ton) dan Pekanbaru (327,8 ton).

Dari data di atas terlihat bahwa kabupaten yang mempunyai *fishing ground* di kawasan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka mempunyai produksi yang tinggi di dibandingkan dengan kawasan yang *fishing ground*-nya di luar daerah tersebut. Berdasarkan data yang ada memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan produksi dari tahun ke tahun terutama pada penangkapan di wilayah lautan. Meskipun demikian, penangkapan di wilayah perairan umum juga masih menunjukkan prospek yang baik karena produksi dari daerah ini juga masih tinggi bahkan mencapai lebih dari 100% untuk daerah tertentu. Oleh sebab itu usaha penangkapan di provinsi Riau benar-benar mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang asal dilakukan secara profesional dan manajemen yang baik.

#### 4. Pemasaran Hasil Perikanan

Dilain pihak berdasarkan volume perdagangan yang terjadi di pasaran lokal ataupun regional ataupun internasional memperlihatkan bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup besar dari seluruh kabupaten yakni antara 1,48-66,22%, kecuali bagi kota Pekanbaru terjadi penurunan volume perdagangan hasil perikanan (-20%). Hal ini terjadi karena perdagangan yang semula melalui kota Pekanbaru sekarang telah beralih ke daerah lain, apalagi setelah banyaknya dibuka perdaganagn lintas batas bagi daerah-daerah yang berdampingan dengan negara tujuan pemasaran seperti Malaysia dan Singapura. Perkembangan

pola pemasaran dari lokal ke internasioanl ini membawa dampak bagi pengembangan dari masing-masing kabupaten.

Hasil pemasaran produksi perikanan dalam bentuk ekspor tercatat sebesar 19,87-66,22% dari masing-masing kabupaten dan yang tertinggi adalah ekspor melalui kota Batam (17939 ton atau 66,22%) dan terkecil melalui kabupaten Kepulauan Riau (B) (19482 ton atau 19,87%). Sedangkan perdagangan antar pulau di Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan hanya 4,57% dan untuk daerah kabupaten lain rata-rata mengalami penurunan volume produksi lebih dari 10%.

Seterusnya diketahui bahwa jumlah ikan yang masuk ke provinsi Riau tercatat berasal dari kabupaten Indragiri Hulu (44,33%), Kampar (-7,9%) dan Pekanbaru (11,45%). Berdasarkan tingkat konsumsi maka di provinsi Riau tingkat konsumsi ikannya berkisar antara -18,88-6,41% kg per kapita per tahun 1998.

#### 5. Sarana dan Fasilitas Pendukung Perikanan

Permasalahan sarana, prasarana dan fasilitas perikanan sangat vital dalam pengembangan usaha perikanan. Komponen ini seyogyanya harus ada dan memadai untuk kebutuhan usaha tersebut (Jackson and Thomas, 1990; McManus and Michael, 1987). Berdasarkan laporan Statistik Perikanan kabupaten dan Provinsi serta Kabupaten dan Provinsi Dalam Angka (selama lima tahun terakhir) tidak ditemukan data tentang sarana, prasarana dan fasilitas perikanan. Hal ini terjadi karena banyak diantara komponen tersebut di atas tidak didata secara baik dalam laporan statistik tersebut. Disamping itu, banyak dari komponen tersebut merupakan hasil

swadaya masyarakat setempat ataupun swasta.

Berdasarkan pengamatan lapangan ditemukan beberapa sarana, prasarana dan fasilitas perikanan dan sebagian besarnya telah berumur tua. Untuk sarana perikanan tersedia sebanyak 35432 unit, sedangkan prasarana ditemukan sejumlah 8 unit dan fasilitas perikanan tangkap sejumlah 5 unit. Jumlah ini jauh dari cukup untuk kebutuhan pengembangan perikanan tangkap. Khusus untuk kabupaten Indragiri Hilir (yang berada di pesisir pantai) memerlukan sarana, prasarana dan fasilitas yang setara dengan kawasan kepulauan lainnya. Sedangkan bagi kabupaten yang berada di daratan (seperti Indragiri Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru) kemungkinan pengembangan sektor penangkapan secara geografis kurang mendukung, kecuali untuk penangkapan ikan di perairan umum. Bila sektor penangkapan laut lepas akan dikembangkan secara komersial maka diperlukan kelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas perikanan yang memadai.

## Kesimpulan Dan Saran

### 1. Kesimpulan

Potensi sumber daya hayati perikanan cukup memadai, khusus untuk Laut Cina Selatan tersedia potensi belum tergarap sebesar 53,61 %, tetapi untuk Selat Malaka menunjukkan tingkat pemanfaatan yang maksimal.

Ketersediaan armada dan alat penangkapan ikan di kawasan pantai cukup memadai tetapi masih bersifat tradisional dan sebagian besar armada tangkap tidak layak untuk beroperasi di perairan lepas pantai (diatas 7 mil). Sedangkan alat tangkap yang ada masih

bersifat tradisional dengan ukuran yang terbatas yang hanya cocok dioperasikan di perairan pantai, sehingga untuk dioperasikan ke perairan lepas pantai menjadi tidak layak.

Ketersediaan sumberdaya daya manusia sebagai pekerja terlihat cukup memadai berdasarkan jumlah RTP, tetapi berdasarkan kualitas masih diperlukan pelatihan dan penyuluhan serta bimbingan dari para ahli perikanan, terutama untuk beradaptasi dengan peralatan moderen.

Sarana, prasarana dan fasilitas perikanan sebagai pendukung kegiatan usaha perikanan tangkap ditemukan dalam jumlah yang sangat memprihatinkan dan jauh dari memadai.

### 2. Saran

Untuk pengembangan usaha perikanan tangkap di provinsi Riau sangat memungkinkan dan prospektif sekali, tetapi diperlukan upaya-upaya antara lain; (1) informasi tentang perairan lepas pantai, terutama laut Cina Selatan, (2) pengembangan armada perikanan untuk perairan lepas pantai, (3) penerapan alat tangkap dan instrumentasi perikanan yang moderen dan efisien, (4) perlu dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas perikanan yang memadai bagi daerah-daerah perikanan potensial, terutama bagi kawasan yang berpantai. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia antara lain adalah memberi pelatihan, penyuluhan dan pendidikan tambahan yang bermanfaat bagi upaya peningkatan pendapatan nelayan dan kesejahteraannya.

## Daftar Kepustakaan

- Ayodhya. 1975. Fishing Methods. Bagian Penangkapan Ikan, Fakultas Perikanan IPB, Bogor. 167 hal.
- Ferno, Anders and Steinar Olsen. 1994. Marine Fish Behaviour In Capture And Abundance Estimation. FishingNews Books. Australia. 221 p.
- Hannesson, R. 1993. Bioeconomic Analysis of Fisheries. Published by The Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fishing News Books. Cambridge, UK. 138 p.
- Jackson, Leslie., and Thomas D. Morton. 1990. Reed's General Engineering Knowledge for Marine Engineers. Published by Thomas Reed Publications Limited. London. Fourth Edition. 519 p.
- Jones, F. R. H. 1968. Fish Migration. Edward Arnold (Publishers) Ltd, London. 325 p.
- McManus, John and Michael Elliott. 1989. Developments in Estuarine and Coastal Study Techniques. Published by Olsen and Olsen Publishers, Denmark. 158 p.
- Nakamura, Hiroshi. 1969. Tuna Distribution and Migration. Fishing News (Books) Ltd. London. 76 p.
- Regenstein, Joe M and Carrie E. Regenstein. 1991. Introduction to Fish Technology. Published by Van Nostrand Reinhold, New York. 267 p.
- Ricker, W.E., 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of isdh Population. Department of The Environment Fisheries and Marine Service, Ottawa. 382 p.
- Royce, William F. 1984. Introduction to the Practice of Fishery Science. Academic Press, Inc. Harcourt Brace Jovanovich Publishers. London. 428 p.
- Statistik Perikanan Provinsi Riau. 1997. Laporan Statistik Perikanan Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan Kelautan, Pekanbaru.
- Statistik Perikanan Provinsi Riau. 1997. Laporan Statistik Perikanan Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan Kelautan, Pekanbaru. hal.
- Statistik Perikanan Provinsi Riau. 1998. Laporan Statistik Perikanan Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan Kelautan, Pekanbaru. hal.
- Statistik Perikanan Provinsi Riau. 1999. Laporan Statistik Perikanan Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan Kelautan, Pekanbaru. hal.
- Riau Dalam Angka. 1996. Laporan Statistik Provinsi Riau. Kantor BPS Riau. hal.
- Riau Dalam Angka. 1997. Laporan Statistik Provinsi Riau. Kantor BPS Riau. hal.
- Riau Dalam Angka. 1998. Laporan Statistik Provinsi Riau. Kantor BPS Riau. hal.
- Riau Dalam Angka. 1999. Laporan Statistik Provinsi Riau. Kantor BPS Riau. hal.